

## **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN BERAU**

**Tritura Andang Mangeka**

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[Trituraandangmangeka@gmail.com](mailto:Trituraandangmangeka@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini menjelaskan proses kolaborasi antar stakeholders dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Berau dan menjelaskan peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan dalam menjadi mitra. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi kerjasama dalam kolaborasi antar aktor guna mengembangkan UMKM di Kabupaten Berau. Kolaborasi tersebut dapat terlihat dari; (1)*Assessment*, aktor kolaborasi memiliki komitmen yang sama dalam memajukan dan mengembangkan UMKM di Kabupaten Berau. Setiap aktor menjalankan peranannya dengan sungguh-sungguh sebagai upaya untuk mewujudkan misi kolaborasi yang dijalankan. (2)*Initiation*, Diskoperindag aktif memberikan pelatihan dengan menggandeng PT Berau Coal sebagai mentor dan pemateri dalam pelatihan. (3)*Deliberation*, Diskoperindag telah dengan baik menjalin komunikasi dengan para pelaku UMKM. Diskoperindag juga terbuka dengan usulan dan masukan yang diberikan oleh para pelaku UMKM. (4)*Implementation*, Diskoperindag berau berperan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator.

**Kata Kunci ;** *Collaborative governance*, Pengembangan & Pemberdayaan, UMKM

## A. PENDAHULUAN

Kondisi sosial ekonomi Indonesia mendorong banyak berdirinya usaha-usaha, terutama usaha kecil kelas menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhannya, khususnya di Kabupaten Berau. Oleh karena itu, perannya diharapkan dapat membawa kemakmuran bagi Kabupaten Berau. UMKM khususnya usaha mikro dan kecil memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian karena dianggap sebagai andalan perekonomian Kabupaten Berau. Mereka berperan besar dalam pengembangan UMKM dengan membantu program UMKM berkembang tidak hanya di pasar lokal. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di negara berkembang seperti Indonesia sering dikaitkan dengan upaya mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan UMKM di Indonesia seringkali dipandang sebagai kebijakan penciptaan lapangan kerja atau kebijakan pengentasan kemiskinan atau kebijakan retribusi pendapatan (Gaol & Meidiyustiani, 2018).

Menurut data yang penulis dapatkan dari akses website BPS Kabupaten Berau, jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Berau cukup banyak sekitar 3.000 UMKM sehingga hal tersebut dapat menambah jumlah lapangan pekerjaan, terutama pada lingkungan usaha. Peran UMKM di Kabupaten Berau dinilai sangat penting untuk membantu dalam pembangunan daerah apalagi Kabupaten Berau cukup terkenal dengan objek wisatanya yang sudah mendunia. Jumlah usaha mikro yang terus bertambah dapat membantu masyarakat untuk terus melakukan inovasi terhadap produk-produk usaha yang akan dibuat, hal tersebut terlihat bahwa jumlah usaha mikro di Kabupaten Berau sendiri berjumlah sangat besaryaitu 3.000 unit usaha. Hal tersebut akan terus meningkat seiring dengan perkembangan UMKM dan pembukaan usaha-usaha baru yang ada di Kabupaten Berau dann terus bertambah diarea-area wisata unggulan di Kabupaten Berau.

Dewasa ini, dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Berau masih belum bisa berkembang secara signifikan karena ada beberapa faktor meskipun secara potensi dan dukungan kebijakan yang inklusif harusnya UMKM Berau sudah mampu memberikan kontribusi peningkatan taraf ekonomi di Kabupaten Berau. Adapun hambatan tersebut seperti keterbatasan akses pendanaan, salah satu hambatan utama dalam pengembangan UMKM adalah akses terhadap pendanaan yang mencukupi. Banyak UMKM di daerah ini mungkin kesulitan mendapatkan pinjaman atau modal usaha yang diperlukan untuk memperluas operasi mereka, mengembangkan produk baru, atau meningkatkan kapasitas produksi (Fitriyanti, 2021). Keterbatasan keterampilan dan pengetahuan wirausaha, banyak pelaku UMKM mungkin tidak memiliki keterampilan manajemen bisnis dan pengetahuan pemasaran yang memadai. Ini dapat

menghambat kemampuan mereka untuk mengelola bisnis dengan baik, mengambil keputusan strategis, dan mengikuti tren pasar (Normansyah, 2022). Kurangnya akses pelatihan dan pendampingan, program pelatihan dan pendampingan yang dapat membantu UMKM dalam meningkatkan keterampilan, inovasi produk, dan strategi pemasaran sering kali kurang tersedia atau belum efektif diimplementasikan. Kurangnya kesadaran akan branding dan pemasaran, banyak UMKM mungkin belum memahami pentingnya branding yang kuat dan strategi pemasaran efektif dalam menarik pelanggan. Ini dapat membatasi daya tarik produk mereka di pasar (Astakoni et al., 2019)

Penting untuk memahami dan mengatasi hambatan-hambatan ini agar pengembangan UMKM di Kabupaten Berau dapat dioptimalkan. Upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta dapat membantu mengatasi tantangan ini dan mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan.

Model tata kelola kolaborasi menjelaskan bahwa banyak pihak atau pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam kerjasama pengembangan UMKM. Sehingga dalam hal ini, latar belakang kerjasama pemerintahan adalah kerjasama dimana kelompok kepentingan memiliki tujuan dan visi yang sama yang ingin dicapai sehubungan dengan kerjasama sejak sejarah, saling menghormati, aktor yang saling percaya, keterampilan dan pengetahuan yang berbeda antar aktor dalam kolaborasi (Setianingsih et al., 2022). Konsep *Collaborative governance* yang dikembangkan di Indonesia diimplementasikan melalui kerjasama antar daerah, misalnya di Kabupaten Berau. Di Kabupaten Berau, pemerintah daerah menjalin kerjasama dalam bentuk UMKM. Salah satu bentuk kerjasama pemerintah dengan pengusaha UMKM adalah pemberian bantuan promosi pemasaran dan pelatihan kepada pengusaha mikro, serta memberikan kemudahan akses perizinan sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Berau nomor 6 tahun 2015 tentang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Berau.

Kondisi awal alasan terjadinya kolaborasi atau kerjasama karena pemerintah melihat adanya potensi masyarakat Kabupaten Berau dapat berdaya saing dengan produk olahan usaha dengan daerah lain. Sehingga pemerintah Kabupaten Berau saat ini terus melakukan banyak inovasi dalam mengembangkan produk olahandengan dukungan pemasaran yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau. Dengan adanya kegiatan fasilitasi pemasaran tersebut dinilai dapat memebantu para pelaku usaha untuk mempercepat pemasaran hasil olahan produk mereka agar dapat dipasarkan hingga keluar daerah.

Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan dalam memberikan asah kemampuan dan mendukung

berkembangnya para pelaku UMKM yang ada di Berau, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan menggandeng PT. Berau Coal untuk memberikan pendampingan dan pelatihan kepada para pelaku UMKM yang ada di Berau. Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Berau dengan profesional dari pihak swasta dimaksudkan untuk menciptakan sinergi bersama dalam membangun perekonomian dan penguatan ekonomi daerah, serta meningkatkan kemampuan dan kualitas UMKM yang ada di Berau.

Daya saing UMKM dapat ditingkatkan dengan inovasi, karena inovasi terbukti berdampak positif terhadap daya saing. Baik itu inovasi dalam produksi, pengemasan maupun pemasaran produk-produk UMKM tersebut. Inovasi adalah kegiatan kreatif usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya. Perusahaan-perusahaan kreatif ini tidak sekadar muncul, mereka membaca kondisi pasar dan *insight* dari UMKM sendiri. Dalam penelitian terdahulu menurut Emerson dan Nabatchi menyatakan bahwa dalam kolaborasi diperlukan adanya Prinsip Bersama, kepentingan bersama, dan kapasitas bersama dalam Sumber Daya mengenai pengembangan tata kelola kolaboratif di UMKM, saat ini jelas ada kepentingan dalam pengembangan UMKM. Apalagi saat ini sudah memasuki era digital, di mana negara sebagai pengambil keputusan harus mereformasi jangkauan layanan bagi para pelaku usahamikro dan menengah (Sembiring & Subekti, 2021). Salah satu bentuk inovasi pemerintah Kabupaten Berau yang diberikan kepada UMKM yaitu melalui fasilitasi pemasaran produk yang akan dikenalkan kepada masyarakat luas dan pelatihan yang akan meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Berau.

Melihat dengan segala potensi yang dimiliki oleh UMKM di Kabupaten Berau dalam mendukung penguatan ekonomi daerah, sudah sepatutnya mendapat dukungan atas iklim usaha yang kondusif di Berau dari Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memfasilitasi pengembangan UMKM dengan kebijakan-kebijakan strategis yang berdampak langsung terhadap pelaku UMKM dan menjadi penghubung juga dengan pelaku industry lain guna meningkatkan keterampilan dan manajemen UMKM yang ada. Langkah strategis tersebut pastinya akan memerlukan suatu kolaborasi inklusif agar apa yang nantinya menjadi kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Berau dapat terimplementasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan tata kelola pemerintahan, *collaborative governance* (tata kelola pemerintahan kolaboratif) menjadi trend dan fenomena baru yang menarik diteliti dan dikaji. *Collaborative governance* sendiri telah dikembangkan selama dua dekade terakhir. *Collaborative governance* merupakan langkah tatanan pemerintahan yang didalamnya terdapat keterlibatan semua pihak antara *government, civil society, dan*

*private sectore* dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan kerangka egalitariansime dan demokrasi melahirkan tata pemerintahan yang mengedepankan kepentingan *society*. Kolaborasi antara *government, civil society, dan private sectore* merupakan langkah-langkah optimalisasi peran *government* dalam implementasi kebijakan publik dan penyelenggaraan pelayanan *public* (Astuti, 2020).

Proses *collaborative governance* yang simpulkan oleh Ricardo S. Morse & John B. Stephens dalam jurnalnya yang berjudul *Teaching Collaborative Governance: Phases, Competencies, and Case-Based Learning* (2012: 565-583), berikut empat tahap dalam proses *collaborative governance* dalam Morse & Stephens, antara lain: 1) *Assessment* 2) *Initiation* 3) *Deliberation* 4) *Implementation*. (Kurniadi & Suryadi, 2021)

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilaksanakan di Kabupaten Berau. Fokus penelitian ini menjelaskan proses kolaborasi antar stakeholders dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Berau dan menjelaskan peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan dalam menjadi mitra. Peneliti menjabarkan focus penelitian tersebut dengan pengembangan analisa teori proses *collaborative governance* oleh Morse & Stephens. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dan menggunakan teknik analisa data berdasar pandangan Milles, Huberman, & Saldaña (2014) dalam (Sahir, 2022), analisis data kualitatif dibagi kedalam tiga aktivitas, yaitu (1) Kondensasi Data (*Data Condensation*); (2) Penyajian Data (*Display Data*); (3) Menggambarkan dan Menarik Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusion*).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Assessment (Penilaian)*

Kondisi awal dalam suatu kolaborasi dipengaruhi oleh beberapa fenomena, yaitu para stakeholders memiliki kepentingan dan visi bersama yang ingin dicapai, yakni Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau menginginkan adanya pembangunan ekonomi dan penguatan ekonomi lokal melalui UMKM. Para pelaku UMKM di Berau saat ini juga menghadapi beberapa kendala dan actor yang mampu meminimalisir kendala tersebut adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau dengan program pemberdayaannya. Diskoperindag Kabupaten Berau dalam menjalankan pemberdayaan UMKM juga menggandeng pihak PT. Berau Coal. Kolaborasi antara Diskoperindag Kabupaten Berau dengan PT. Berau Coal untuk membantu menyelesaikan masalah UMKM sudah di wujudkan dalam beberapa program diantaranya program pelatihan dimana pihak dari PT Berau Coal menjadi mentor

UMKM dan pemateri untuk setiap pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau. Pada tahun 2022, PT Berau Coal bekerja sama dengan Diskoperindag Kabupaten Berau menyalurkan bantuan 15 Booth UMKM di kawasan Tanjung Redeb. PT Berau Coal juga aktif melakukan program pendampingan untuk UMKM dalam upaya meningkatkan kualitas produk UMKM dan pemasaran produk UMKM. Selain program tersebut, beberapa program kolaborasi antara UMKM, Diskoperindag Kabupaten Berau, dan PT Berau Coal yakni Rumah Kemas UMKM yang menghadirkan pusat oleh-oleh khas Berau, Pendampingan lebih dari 200 UMKM Mitra, penyaluran booth jual, dan yang akan segera terealisasi juga yakni sentra UMKM Berau.

Berdasarkan analisa diatas, dapat kita ketahui bahwa actor kolaborasi dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Berau memiliki komitmen yang sama dalam memajukan dan mengembangkan UMKM di Kabupaten Berau. Setiap actor menjalankan peranannya dengan sungguh-sungguh sebagai upaya untuk mewujudkan misi kolaborasi yang dijalankan. Selain diadakannya kebijakan dan program atas kolaborasi anatara Diskoperindag dengan PT. Berau Coal, Diskoperindag juga menghadirkan dan memberikan bimbingan serta evaluasi agar UMKM mampu berkembang dan melakukan inovasi produk agar mampu bersaing dipasar global. Pemberdayaan yang diberikan oleh Diskoperindag berupa pelatihan dan mendorong UMKM untuk memiliki legalitas usaha..

### ***Initiation (Inisiasi)***

Tahap inisiasi atau permulaan juga merupakan dimana setelah jelas bahwa diperlukannya kolaborasi antara Diskoperindag dengan UMKM dan stakeholder lain dalam pengembanhgan UMKM di Berau, maka tahap ini akan dilaksanakan dengan melibatkan peran sponsor atau mungkin akan menjadi sumber daya itu sendiri serta mengumpulkan para pemangku kepentingan untuk mengembangkan kelompok kerja yakni dari actor swasta. Aktor swasta yang terlibat dalam kolaboorasi pengembangan UMKM di Kabupaten Berau adalah PT. Berau Coal. Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan UMKM adalah seluruh pelaku UMKM yang berada dibawah binaan Diskoperindag dan yang tergabung dalam UMKM Mitra PT. Berau Coal. Sumber daya juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan kerjasama. Hakikatnya sumber daya dapat berupa manusia sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan bersama dan dana juga fasilitas fisik juga merupakan sumber daya yang dapat menunjang pekerjaan di sebuah organisasi.

Aparatur birokrasi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau melihat bahwa keberhasilan sebuah program tergantung dari para pelaksana kebijakan itu tersendiri. Dalam hal ini erat keterkaitannya dengan para pegawai dalam ruang lingkup Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau. Terutama Sumber Daya Manusia yang dari segi

kuantitas belum cukup mencukupi, hal tersebut menjadi salah satu alasan untuk Diskoperindag melakukan kolaborasi dengan PT Berau Coal dalam upaya pendampingan UMKM dan menjadi mentor dalam program pelatihan yang ditujukan untuk UMKM.

Hadirnya pemerintah tidak hanya sekedar membuat sebuah kebijakan tapi kehadiran pemerintah harus menjembatani masyarakat dalam proses pemberdayaan. Pemberdayaan para pelaku usaha di Kabupaten Berau salah satu upaya yang dilakukan adalah menjembatani para pelaku usaha untuk membangun kemitraan dengan para pelaku usaha yang lebih besar. Upaya menjembatani para pelaku UMKM dengan pelaku usaha dengan skala yang lebih besar dilakukan Diskoperindag dengan menggandeng PT Berau Coal untuk bersama mengembangkan UMKM di Berau. Melalui kolaborasi dan kemitraan tersebut para pelaku usaha akan saling bekerjasama baik dari segi pemasaran atau bantuan modal. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau juga menggandeng perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di Berau salah satunya yakni PT Berau Coal dalam proses memberdayakan UMKM seperti melibatkan perusahaan tersebut dalam proses pemberian pelatihan hingga pemasaran dan penyertaan modal.

Modal merupakan permasalahan yang paling mendasar dari kegiatan usaha masyarakat, permasalahan tersebut juga menjadi kendala dari kegiatan usaha masyarakat di Kabupaten Berau. Sehingga hal tersebut menjadi fokus dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau agar dapat memaksimalkan kegiatan usaha masyarakat.

Hal yang paling mendasar untuk diperhatikan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau adalah ketersediaan modal. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau selalu memaksimalkan seluruh potensi yang ada agar pelaku usaha dapat memperoleh modal dalam membangun usaha yang dibangun masyarakat.

Sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing global menjadi hal penentu kesuksesan UMKM. Untuk itu dibutuhkan pengelolaan sumber daya manusia sehingga masing-masing individu yang bekerja dapat berkontribusi secara maksimal bagi UMKM. Pelaku UMKM di Kabupaten Berau mendapatkan pelatihan dari pemerintah yakni dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan terkait bagaimana membuat produk yang dapat dilirik masyarakat. Pelatihan tersebut tidak hanya bagaimana cara memasarkan tapi juga bagaimana membuat kemasan produk agar menarik untuk dibeli.

Kehadiran pemerintah Kabupaten Berau dan PT Berau Coal dalam memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha membuat masyarakat lebih mudah mengembangkan usaha yang dimiliki. Dengan demikian pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dapat dikatakan berhasil. Berdasarkan observasi

penulis terkait sumber daya dalam kebijakan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan memberdayakan UMKM di Kabupaten Berau mengacu kepada ketersediaan sumber daya manusia dan ketersediaan modal. Misalnya saja dalam sumber daya manusia program pemberdayaan UMKM, dari segi kualitas pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau memiliki kualitas yang baik namun dari segi kuantitas masih kurang dan tetap harus belajar dan berlatih agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman apalagi saat ini sedang menghadapi persaingan global dan trend perkembangan digital, karena bila melihat jumlah luas wilayah Kabupaten Berau, jumlah UMKM yang begitu banyak sekitar 15 ribuan UMKM masih belum mencukupi jumlah pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau untuk melakukan pembinaan ke lapangan secara menyeluruh. Dalam menutupi kekurangan tersebut, upaya Diskoperindag dalam menggandeng PT Berau Coal untuk berkolaborasi mengembangkan UMKM di Berau adalah keputusan yang sangat tepat. Menanamkan pengetahuan kepada para pelaku usaha tentang bagaimana menjalankan usaha dengan baik membuat masyarakat lebih mudah mengembangkan usaha yang dimiliki. Selanjutnya ketersediaan modal merupakan penopang sehingga pengembangan usaha bagi para pelaku UMKM dapat berjalan dengan baik.

Dari analisa diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mendukung pemberdayaan UMKM, Diskoperindag aktif memberikan pelatihan-pelatihan yang tujuannya untuk meningkatkan soft skill dari para pelaku UMKM di Berau. Pelatihan yang dilaksanakan tersebut menggandeng PT Berau Coal sebagai mentor dan pemateri dalam pelatihan. Selain itu Diskoperindag juga melakukan upaya peningkatan kemampuan permodalan untuk menunjang kegiatan UMKM. Secara sumber daya manusia, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau telah memiliki sumber daya aparatur yang kompeten dan mampu menjadi pendamping pelaku UMKM mengatasi masalah yang mereka hadapi, namun jumlah sumber daya aparatur di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau sangat terbatas yang menjadikan peran mereka belum bisa maksimal menjangkau para pelaku UMKM di Kabupaten Berau. Keterbatasan aparatur Diskoperindag dalam pemberdayaan dan pendampingan UMKM di Berau telah ditutup oleh PT Berau Coal. PT Berau Coal saat ini aktif melakukan pendampingan dengan lebih dari 200 UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Berau. Untuk sumber daya anggaran dan sarana prasarana, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau memiliki pos anggaran yang cukup dan fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan pemberdayaan UMKM. Untuk sumber daya fasilitas atau sarana prasarana, Diskoperindag juga didukung oleh PT. Berau Coal, dimana PT Berau Coal telah menyalurkan Booth jualan untuk UMKM dan

membangun Rumah Kemas UMKM guna mendukung peningkatan kualitas produk UMKM di Berau.

### **Deliberation (Musyawarah)**

Musyawarah dan dialog yang terjadi dalam proses *collaborative governance* merupakan sebuah bagian dari proses saling belajar bagi setiap pemangku kepentingan yang tujuannya untuk menciptakan dan menggali banyak pilihan dalam menjalankan kerja sama tersebut. Ketika musyawarah dan dialog dilakukan, maka setiap pemangku kepentingan mengeluarkan pendapat dan saling bertukar pikiran tentang bagaimana menciptakan solusi-solusi baru dalam mengatasi permasalahan yang mereka hadapi.

Proses pengembangan UMKM di Kabupaten Berau selalu diikuti dengan berbagai macam masalah-masalah kecil dilapangan, walaupun begitu tetap saja sebuah masalah kecil yang terjadi berulang-ulang akan mengurangi keefektifan kinerja dari pemangku kepentingan. Masalah-masalah yang sering terjadi seperti akses modal dan perizinan, fasilitas pendukung usaha, produk usaha yang kurang mampu bersaing, hingga akses pasar yang sulit mereka jangkau.

Dari musyawarah atau dialog yang dilakukan oleh Diskoperindag dengan pelaku UMKM maupun Diskoperindag dengan PT. Berau Coal pastinya akan menghadirkan suatu keputusan bersama. Kesepakatan kolaboratif merupakan sebuah kesepakatan bersama dari setiap pemangku kepentingan, kesepakatan ini merupakan hasil dari pertemuanpertemuan, diskusi, serta musyawarah dan dialog yang sebelumnya sudah dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam *collaborative governance*, dan sifat dari kesepakatan ini merupakan hasil konsensus bersama. Kesepakatan kolaboratif inilah yang nantinya akan dijalankan bersama oleh setiap pemangku kepentingan dalam kerja sama yang akan dilakukan, yang mungkin berupa berbagai macam solusi bersama yang telah dibahas sebelumnya, serta bagaimana penanganan yang dilakukan dalam setiap masalah. Sehingga dengan adanya kesepakatan kolaboratif ini maka setiap pemangku kepentingan berkerja sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama tersebut.

Dalam mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM, Diskoperindag Kabupaten Berau telah dengan baik menjalin komunikasi dengan para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Berau. Setiap ada kebijakan dan program yang akan diimplementasikan dan menyasar UMKM sebagai objek kebijakan, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau selalu mensosialisasikannya terlebih dahulu. Untuk mengembangkan UMKM di Kabupaten Berau berdaya saing. Diskoperindag Kabupaten Berau juga membuka kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk berkomunikasi secara langsung dengan para birokrat dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, namun sampai saat ini pemenuhan atas kebutuhan sumber daya aparatur di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan yang terkhusus untuk menangani

UMKM masih terbatas hal tersebut menjadikan terjadinya kolaborasi antara Diskoperindag dengan PT. Berau Coal untuk program pendampingan UMKM. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau juga terbuka dengan usulan dan masukan yang diberikan oleh para pelaku UMKM atas program-program pelatihan yang nantinya Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau akan jalankan.

### ***Implementation (Implementasi)***

Tugas dari Diskoperindag adalah menghadirkan regulasi yang inklusif. Selain menjalankan perannya sebagai regulator, Diskoperindag berau juga berperan sebagai fasilitator, dan katalisator. Dalam menjalankan peranannya tersebut utamanya untuk menjalankan peranan sebagai fasilitator dan katalisator. Diskoperindag Kabupaten Berau menghadapi beberapa kendala yang menjadikan akhirnya Diskoperindag berkolaborasi dengan pihak swasta yakni PT Berau Coal. Dalam kolaborasi ini PT Berau Coal menjadi mentor dalam pelatihan yang dihadirkan Diskoperindag ke pelaku UMKM. PT Berau Coal juga aktif dalam membantu pendampingan UMKM dan menyediakan bantuan fasilitas penunjang kegiatan UMKM. Program pelatihan dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau merupakan kolaborasi dengan PT. Berau Coal yang menjadi mentor dari UMKM. Dengan program pelatihan yang telah dijalankan, pelaku UMKM telah merasakan manfaatnya yakni UMKM telah semakin tumbuh dan kualitas produk dari UMKM sudah berinovasi dan pasar mereka makin meluas

## **E. PENUTUP**

Proses kolaborasi antar aktor dalam kolaborasi pengembangan UMKM di Kabupaten Berau sudah berhasil. Assessment (Penilaian), actor kolaborasi dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Berau memiliki komitmen yang sama dalam memajukan dan mengembangkan UMKM di Kabupaten Berau. Selain dihidirkannya kebijakan dan program atas kolaborasi anatara Diskoperindag dengan PT. Berau Coal, Diskoperindag juga menghadirkan dan memberikan bimbingan serta evaluasi agar UMKM mampu berkembang dan melakukan inovasi produk agar mampu bersaing dipasar global. Pemberdayaan yang diberikan oleh Diskoperindag berupa pelatihan dan mendorong UMKM untuk memiliki legalitas usaha. Initiation (Inisiasi), Diskoperindag aktif memberikan pelatihan-pelatihan yang tujuannya untuk meningkatkan soft skill dari para pelaku UMKM di Berau. Pelatihan yang dilaksanakan tersebut menggandeng PT Berau Coal Deliberation (Musyawarah). Diskoperindag Kabupaten Berau telah dengan baik menjalin komunikasi denga para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Berau. Setiap ada kebijakan dan program yang akan diimplementasikan dan menyasar UMKM sebagai objek kebijakan,

Diskoperindag selalu mensosialisasikannya terlebih dahulu. Implementation (Implementasi), Diskoperindag berau berperan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astakoni, I. M. P., Sunata, I. G. N., Swaputra, I. B., & Nursiani, P. (2019). *Pemberdayaan UMKM Melalui Penataan Stasiun Kerja Peremajaan Fasilitas Produksi dan Manajemen Usaha*. 3(1), 84–89.
- Astuti, W. dan R. (2020). Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik. In *Collaborative Govenance Dalam Perspekit Publik*. Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- Fitriyanti. (2021). Implementasi Program Bpum Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Gaol, D. F. L., & Meidiyustiani, R. (2018). Model pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam revitalisasi kampung tekstil. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2622–2191), 79–95.  
<http://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/6>
- Kurniadi, & Suryadi, S. (2021). *Collaborative-Governance: Teori dan Implementasi* (p. 266). CV PENA PERSADA. [www.penapersada.com](http://www.penapersada.com)
- Normansyah, N. (2022). Memberdayakan Umkm Dalam Ekonomi Di Kelurahan Bunut Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 379–383. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i2.4272>
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi penelitian*.

- Sembiring, R. A., & Subekti, T. (2021). Analisis Aktor dalam Tata Kelola Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Batu untuk Kualitas Internasional. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(1), 31. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i1.30416>
- Setianingsih, E. L., Herawati, A. R., & Hariani, D. (2022). *Penta Helix Model Tourism Development in the city of Palembang*. 3(13), 2221–2226.